

000

**PESONA SUPERMOON
'BEAVER MOON'**

Fenomena bulan purnama terbesar tahun 2025 Supermoon 'Beaver Moon' atau Berang-berang, menjadi daya tarik warga dan wisatawan di sejumlah negara. Salah satunya di Sydney, Australia yang tampak bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan di langit malam kawasan North Bondi. (REUTERS.ist)

IRONI TANAH 16 HA JUSUF KALLA DISEROBOT MAFIA

DPR Minta Dugaan Keterlibatan Lippo Grup Diusut

Kasus mafia tanah kembali mencuat dan kali ini menimpa tokoh nasional sekelas Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu meluapkan kekesalannya atas sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang berujung pada eksekusi lahan seluas 16,4 hektare oleh Pengadilan Negeri Makassar. JK menuding ada praktik mafia tanah di balik putusan tersebut karena lahan yang disengketakan telah dimiliki Hadji Kalla secara sah sejak 1993. "Ini bentuk perampasan hak yang dilegalkan," ujarnya tegas. Sengketa itu memantik reaksi DPR yang mendesak agar dugaan keterlibatan PT Lippo Group dan pihak lain segera diusut tuntas. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan PT Hadji Kalla merupakan pemilik sah lahan di Gowa, serta mengaku telah mengirim surat resmi kepada pengadilan untuk mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan, mengingat belum ada proses konstatirng atau pengukuran ulang. Ironinya, jika figur besar seperti Jusuf Kalla saja bisa menjadi korban permainan mafia tanah, bagaimana nasib rakyat kecil yang tak punya kuasa dan akses untuk memperjuangkan haknya?

BACA HAL 11...

BEBERAPA KASUS BESAR MAFIA TANAH DI INDONESIA

Jusuf Kalla (JK)

- Lokasi: Metro Tanjung Bunga, Makassar.
- Luas: ±16,4 hektare.
- Pihak Terlibat: PT Hadji Kalla vs PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
- Inti Kasus: Lahan milik PT Hadji Kalla diklaim pihak lain dan dieksekusi pengadilan tanpa pengukuran.
- Status: Klarifikasi, Kementerian ATR/BPN mengakui PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah.

Nirina Zubir

- Lokasi: Jakarta dan sekitarnya.
- Nilai Kerugian: ± Rp17 miliar.
- Pihak Terlibat: Mantan pengurus rumah tangga dan oknum BPN.
- Inti Kasus: Sertifikat tanah diganti dengan dokumen palsu dan aset dijual.
- Status: Pelaku divonis penjara, sebagian aset dikembalikan.

Alm. Ustaz Jefri Al Buchori (Uje)

- Nilai Aset: Rp4 miliar.
- Pihak Terlibat: Oknum pengembang dan pihak swasta.
- Inti Kasus: Tanah warisan Uje dijual dengan surat palsu.
- Status: Laporan polisi, sebagian dokumen dikembalikan.

Keluarga A.M. Hendropriyono

- Lokasi: Ciputat, Tangerang Selatan.
- Luas: ±1 hektare.
- Inti Kasus: Tanah diklaim dengan sertifikat ganda, dugaan manipulasi data.
- Status: Sertifikat asli milik Hendropriyono, penyidikan oleh Polda Metro Jaya.

Keluarga Alm. Ibunda Dino Patti Djalal

- Lokasi: Kemang, Cilandak, Pondok Pinang
- Nilai Kerugian: ± Rp11 miliar
- Pihak Terlibat: Sindikat mafia tanah
- Inti Kasus: Sertifikat dipalsukan dan aset dialihkan.
- Status: 15 pelaku ditangkap, sebagian besar aset dikembalikan.

Kasus Tanah Warga Desa Wadas (Purworejo, Jawa Tengah)

- Lokasi: Purworejo, Jawa Tengah.
- Luas: ±114 hektare.
- Inti Kasus: Warga kehilangan tanah akibat klaim ganda dan ketidaktransparanan pengadaan.
- Status: Lahan masuk proyek strategis, namun ada indikasi penyimpangan administrasi.



PRABOWO INSTRUKSIKAN PERCEPATAN 18 PROYEK HILIRISASI RP600 TRILIUN

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025), dengan fokus utama pada percepatan program hilirisasi nasional lintas sektor yang bernilai total Rp600 triliun. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi harus menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia untuk memperkuat struktur industri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Ia memerintahkan seluruh kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian 18 proyek strategis yang telah melalui studi kelayakan agar bisa mulai konstruksi pada 2026, mencakup sektor perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025), membahas percepatan program hilirisasi nasional lintas sektor. Rapat yang berlangsung sore hari itu dihadiri jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya hilirisasi industri di berbagai sektor strategis, seperti perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral, sebagai langkah konkret memperkuat struktur ekonomi nasional dan kemandirian energi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Presiden ke Cilegon dan pembahasan bersama Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (Danantara). Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi dengan total investasi hampir Rp600 triliun.

"Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi serta mineral batu bara. Dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (feasibility study), kita akan selesaikan tahun ini agar pada 2026 bisa masuk tahap lapangan," kata Bahlil kepada wartawan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil menambahkan, percepatan proyek-proyek hilirisasi ini diharapkan memberi multiplier effect besar bagi perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk domestik, dan mengurangi ketergantungan impor.

"Dengan percepatan 18 proyek



Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani (kanan), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), dan Chairman Lotte Group Dong-Bin Shin (kedua kiri) menekan tombol saat peresmian pabrik petrokimia Lotte Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

senilai Rp600 triliun, kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta menghasilkan produk substitusi impor," ujarnya.

Fokus Energi Nasional

Dalam rapat tersebut, isu ketahanan energi nasional juga menjadi sorotan utama. Bahlil menyinggung kebutuhan mendesak untuk membangun industri dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG impor. Ia menyebut konsumsi LPG Indonesia kini mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dan bisa meningkat hampir 10 juta ton pada 2026 jika tidak diantisipasi.

"Tidak bisa kita lama-lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri," tegasnya.

Selain DME, pemerintah juga mempercepat pembangunan kilang minyak domestik untuk memperkuat kemandirian energi. "Kita tahu bahwa 10 November nanti akan ada peresmian kilang minyak baru, dan proyek lain akan menyusul," kata Bahlil.

Dalam kesempatan terpisah, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pembiayaan proyek-proyek hilirisasi tersebut dalam kondisi aman.

"Yang saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa dari sisi pendanaan tidak ada masalah. Kita punya basis pendanaan yang solid. Danantara

mendapat rating AAA dari Pefindo dan Fitch, tertinggi yang pernah kami capai," ujarnya selepas rapat.

Rosan menjelaskan, 18 proyek tersebut akan diluncurkan secara bertahap mulai 2026, tergantung kesiapan teknis dan legalitas masing-masing.

"Dari 18 proyek, beberapa sudah siap secara finansial, legal, administrasi, dan teknologi. Itu yang akan segera dijalankan," ucapnya.

Menurutnya, Danantara siap menjadi katalis dalam pendanaan proyek-proyek strategis nasional, baik melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP) maupun penanaman modal langsung.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa rapat juga membahas cetak sawah baru dan program kampung nelayan. Pemerintah ingin memastikan kebijakan hilirisasi sejalan dengan peningkatan produktivitas sektor pangan dan kelautan.

"Tadi sudah dibahas mengenai hilirisasi, percepatan hilirisasi, cetak sawah, serta perkembangan kampung nelayan," ujar Airlangga.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan bahwa program kampung nelayan kini telah mencapai 20-30 persen, dan ditargetkan 65 persen rampung pada akhir 2025.

"Akhir tahun ini mudah-mudahan

bisa selesai 65 persen. Kami juga mendapat tugas membangun budidaya perikanan di 500 kabupaten," ungkap Sakti.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi adalah tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Dalam beberapa kesempatan, ia menilai keberhasilan hilirisasi akan menentukan kemandirian bangsa dan ketahanan ekonomi nasional.

Ia mengingatkan seluruh menteri agar tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga menyiapkan rantai pasok domestik dan pelibatan UMKM lokal dalam ekosistem industri baru.

Menariknya, Bahlil juga menyinggung sinergi pemerintah dengan Polri dan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan proyek-proyek yang sempat tertunda. Salah satu contohnya adalah pabrik petrokimia di Cilegon yang sebelumnya mengalami stagnasi.(tin,ist/dya)

DAFTAR 18 PROYEK HILIRISASI YANG DIMAKSUD BAHILIL ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- **Smelter Aluminium (Bauksit)** – Mempawah, Kalbar. Investasi Rp60 T, tenaga kerja 14.700.
- **Industri DME (Batu Bara)** – Beberapa lokasi di Kalimantan & Sumatera. Investasi Rp164 T, tenaga kerja 34.800.
- **Industri Aspal** – Buton, Sultra. Investasi Rp1,49 T, tenaga kerja 3.450.
- **Mangan Sulfat** – Kupang, NTT. Investasi Rp3,05 T, tenaga kerja 5.224.
- **Stainless Steel Slab (Nikel)** – Morowali, Sulteng. Investasi Rp38,4 T, tenaga kerja 12.000.
- **Cooper Rod, Wire & Tube (Tembaga)** – Gresik, Jatim. Investasi Rp19,2 T, tenaga kerja 9.700.
- **Besi Baja (Pasir Besi)** – Sarmi, Papua. Investasi Rp19 T, tenaga kerja 18.000.
- **Chemical Grade Alumina (Bauksit)** – Kendawangan, Kalbar. Investasi Rp17,3 T, tenaga kerja 7.100.
- **Olresin (Pala)** – Fakfak, Papua Barat. Investasi Rp1,8 T, tenaga kerja 1.850.
- **Oleofood (Sawit)** – KEK MBTK, Kaltim. Investasi Rp3 T, tenaga kerja 4.800.
- **Produk Kelapa (Nata de Coco, MCT, dll)** – Tenayan, Riau. Investasi Rp2,3 T, tenaga kerja 22.100.
- **Chlor Alkali Plant (Garam)** – 7 provinsi. Investasi Rp16 T, tenaga kerja 33.000.
- **Fillet Tilapia (Ikan)** – Jawa & Banten. Investasi Rp1 T, tenaga kerja 27.600.
- **Carrageenan (Rumput Laut)** – Kupang, NTT. Investasi Rp212 M, tenaga kerja 1.700.
- **Oil Refinery** – 18 lokasi di Indonesia. Investasi Rp160 T, tenaga kerja 44.000.
- **Oil Storage Tanks** – 18 lokasi sama. Investasi Rp72 T, tenaga kerja 6.960.
- **Modul Surya Terintegrasi** – Batang, Jateng. Investasi Rp24 T, tenaga kerja 19.500.
- **Bioavtur (Used Cooking Oil)** – Marunda, Cikarang, Karawang. Investasi Rp16 T, tenaga kerja 10.152.

Ketua Umum KASBI, Sunarno, memimpin langsung aksi yang diikuti sekitar 5.000 buruh dari berbagai sektor dan daerah. Massa berkumpul di kawasan Flyover Taman Ria Senayan sejak pagi, kemudian melakukan long march menuju kompleks parlemen di Senayan. Setibanya di lokasi, mereka melakukan orasi bergantian di depan pagar DPR.

Dalam pidatonya, Sunarno menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai makin menekan kehidupan buruh. Ia menyebut, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem kerja fleksibel seperti outsourcing, kontrak jangka pendek, hingga magang tanpa perlindungan, kesejahteraan buruh semakin jauh dari kata layak.

“Buruh hidup dalam kondisi terjepit. Banyak di antara kami yang menjadi tulang punggung keluarga besar, menanggung orang tua, anak, dan saudara. Upah yang diterima setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan survei, kebutuhan hidup layak buruh mencapai minimal Rp7 juta per bulan,” ujar Sunarno di tengah aksi.

Dalam aksi ini, KASBI menegaskan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR. Tuntutan pertama, mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-buruh dan mencabut aturan yang dinilai eksploitatif. Kedua, menetapkan upah layak nasional dan menaikkan upah tahun 2026 sekurangnya 15 persen. Ketiga, menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, magang eksploitatif, dan kemitraan palsu bagi pekerja ojek online.

Selain itu, mereka menuntut perlindungan bagi buruh perempuan, termasuk ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Pemerintah juga diminta menyediakan fasilitas penitipan anak (day care) yang murah dan berkualitas serta ruang laktasi di tempat kerja.

KASBI turut menyoroti hak-hak pekerja di sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian. Mereka juga menuntut ratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang perlindungan buruh migran dan pekerja perikanan, serta menekan harga kebutuhan pokok seperti sembako, BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan tarif tol.

Dua poin terakhir tuntutan mereka bernada politis dan kemanusiaan: menghentikan represi serta kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan membebaskan tahanan aksi, serta

BURUH KEPUNG DPR, DESAK KENAIKAN UPAH DAN REVISI UU KETENAGAKERJAAN

Ribuan buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Mereka datang dengan membawa 10 tuntutan utama, termasuk desakan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 15 persen dan pembahasan ulang RUU Ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak kepada pekerja.



Massa buruh yang menggelar demonstrasi membawa boneka gurita berukuran besar ke depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025) sebagai simbol korupsi masih merajalela di pemerintahan Indonesia.ist

menyerukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan penghentian perang serta blokade ekonomi global.

Seiring berlangsungnya aksi, sejumlah perwakilan buruh diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang dipimpin oleh Ahmad Heryawan. Dalam audiensi itu, Sunarno meminta DPR agar membuka ruang partisipasi yang luas bagi serikat buruh dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

“Kami ingin agar DPR tidak

mengulang kesalahan seperti saat menyusun UU Cipta Kerja yang sangat minim melibatkan pekerja. Kami berharap proses legislasi kali ini betul-betul melibatkan unsur serikat buruh di seluruh Indonesia,” tegas Sunarno di ruang pertemuan BAM DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa KASBI telah membentuk tim perumus untuk menyiapkan usulan dan draf alternatif RUU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja. Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah dan DPR tidak hanya mendengar suara

pengusaha, melainkan juga memahami realitas kehidupan buruh di lapangan.(gus,ist,ant/dya)

10 TUNTUTAN UTAMA BURUH

- Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh — menolak kebijakan yang merugikan pekerja dan menuntut regulasi baru yang lebih berpihak kepada buruh.
- Terapkan Upah Layak Nasional dan naikan upah tahun 2026 minimal 15 persen.
- Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitatif, dan kemitraan palsu ojol (ojek online).
- Lindungi buruh perempuan dengan ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
- Sediakan fasilitas Day Care (penitipan anak) murah dan berkualitas serta ruang laktasi di tempat kerja.
- Jamin hak-hak buruh sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan.
- Lindungi buruh migran dan pekerja perikanan serta ratifikasi Konvensi ILO No. 188.
- Turunkan harga sembako, BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan tarif tol.
- Hentikan represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, serta bebaskan seluruh tahanan aksi.
- Stop perang, blokade ekonomi, dan genosida; dukung kemerdekaan Palestina.

UMP 2026 Diumumkan Pemerintah 21 November

PEMERINTAH sedang menyiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dijadwalkan akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2025.

Di tengah proses tersebut, kalangan buruh berharap kenaikan UMP tahun depan bisa mencapai 8,5 persen hingga 10 persen, lebih tinggi dari kenaikan tahun 2025 yang sebesar 6,5 persen.

“Harapannya naik 8,5% sampai 10%. Karena harga pokok di Karawang dengan UMP tinggi hampir sama dengan di Jawa Tengah dengan UMP rendah,” ujar Yanti Kusrianti, Ketua LP3 FSP-TSK SPSI Purwakarta, saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Pertimbangan Ekonomi Nasional Mulai Pulih Dari sisi ekonomi makro, sejumlah pengamat menilai ruang kenaikan upah masih terbuka.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai permintaan kenaikan UMP tersebut realistis karena ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

“Memungkinkan saja, karena soal formulasi penghitungan UMP itu bisa diakali. Hal itu juga tidak akan membuat serta-merta investor atau buyer kabur,” jelasnya.

Menurut Media, pemerintah seharusnya melihat UMP bukan hanya sebagai beban perusahaan, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya beli masyarakat.

Ia menambahkan, banyak perusahaan saat ini masih berada dalam struktur ekonomi kapitalistik yang serakah, di mana orientasi utama hanya mencari keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja.

“Banyak studi yang menarik yang justru mengatakan bahwa semakin pekerja itu ditekan, semakin pekerja itu murah upahnya, perusahaan akan semakin rugi. Karena ketika upah dari pekerja itu murah, akan terjadi moral hazard, produktivitas dari pekerja juga akan menurun, tingkat profit dari perusahaan juga akan turun,” paparnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, kesejahteraan pekerja justru menjadi faktor penting bagi keberlanjutan bisnis. “Ini skenario sederhana yang kami lakukan bahwa ketika brand, perusahaan atau apapun industrinya, ketika memperhatikan pekerjaan dengan baik, hope dan chance perusahaan itu akan survive di tengah kondisi perubahan,” imbuh Media.(gus,ist,rls/dya)

Hari Pertama WFH ASN Pemprov Jawa Barat LENGANG GEDUNG SATE DEMI EFISIENSI

Gulita hanya dengan sedikit cahaya menyelimuti Gedung Sate, pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) di Kota Bandung, pada Kamis (6/11/2025). Pintu-pintu kantor tertutup rapat, lampu dan pendingin ruangan padam, sementara meja-meja kerja kosong tanpa aktivitas. Bangunan bersejarah yang biasanya ramai oleh para aparatur sipil negara (ASN) itu kini lengang, seolah berhenti berdetak. Kondisi hening itu menandai hari pertama pelaksanaan uji coba kerja dari rumah (work from home/WFH). Kebijakan ini diterapkan selama dua bulan, mulai November hingga Desember 2025, sebagai upaya menekan biaya operasional dan mencari pola kerja paling efisien menjelang tahun anggaran 2026.

Di koridor Gedung Sate, hanya terlihat petugas keamanan yang berjaga. Tak terdengar suara mesin printer, derap langkah pegawai, ataupun percakapan antarrekan kerja seperti biasanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengatakan, sistem kerja jarak jauh bukanlah hal baru bagi ASN Jabar.

"Ini bukan pertama kali. Saat pandemi Covid-19 dulu kami juga menerapkan sistem yang sama. Bedanya, kali ini dilaksanakan seminggu sekali," ujarnya di Gedung Sate.

Adi menjelaskan, seluruh pegawai sudah diarahkan membuat daftar tugas dan target kerja sebelum WFH dimulai.

"Malam sebelumnya, kami sudah skemakan kegiatan apa saja yang harus dikerjakan di hari Kamis ini, dan masing-masing bidang menetapkan target harian," katanya.

Kebijakan WFH ASN Jawa Barat ini berawal dari penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, mengatakan, WFH merupakan strategi untuk menekan pengeluaran operasional hingga 20 persen.

"Kami ingin melihat seberapa besar efisiensi yang bisa dicapai, misalnya dari penghematan listrik, air, hingga penggunaan AC dan internet," kata Dedi.

Pemprov Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD yang mengatur pelaksanaan uji coba WFH selama dua bulan penuh. Tahap pertama pada November dilakukan seminggu sekali setiap hari Kamis dengan sistem hybrid, sementara pada Desember diterapkan pola 50-50, yakni separuh pegawai bekerja di kantor (work from office/WFO) dan separuh lainnya dari rumah (WFH).

"Desember nanti maksimal 50 persen pegawai bisa WFH. Hasil evaluasi dua bulan ini akan jadi bahan pertimbangan untuk menentukan pola kerja tahun depan," jelas Dedi.

Pemilihan hari Kamis dinilai strategis agar tidak disalahartikan sebagai "hari kejeput" menuju akhir pekan.



Suasana di lorong aula barat Gedung Sate, Kota Bandung yang sepi dari aktivitas para ASN di hari pertama pelaksanaan uji coba WFH, Kamis (6/11/2025). (kcm.ist)

"Kalau Senin atau Jumat dikhawatirkan malah dianggap long weekend, jadi kita ambil hari tengah untuk menjaga kinerja tetap stabil," tambahnya.

Meski begitu, layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Samsat dan unit pelayanan administrasi, tetap

beroperasi normal. Kepala OPD diminta memastikan seluruh ASN tetap melaksanakan tanggung jawabnya selama WFH melalui pelaporan daring dan evaluasi rutin.

Pelayanan Tetap Jalan

Pada pelaksanaan hari pertama, hampir seluruh ruangan di Gedung

Tasikmalaya Masih Kajian, Cimahi Tegas Tolak

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat resmi memulai uji coba kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada November hingga Desember 2025. Namun, kebijakan ini belum menjadi keharusan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Alhasil, respons tiap daerah pun beragam, sebagian masih mengkaji, sebagian lain menolak dengan alasan pelayanan publik harus tetap tatap muka.

Di Kabupaten Tasikmalaya, langkah Pemprov Jabar disikapi dengan penuh kehati-hatian. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menerapkan sistem kerja dari rumah sebelum dilakukan kajian menyeluruh. Ia menilai, WFH harus dibuktikan efektivitasnya terlebih dahulu, terutama dalam konteks pelayanan publik di tingkat daerah

yang masih membutuhkan interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat.

"Prinsipnya, kita harus bisa mengukur efektivitas dan efisiensi dari cara kerja model baru ini," ujar Asep Sopari di Singaparna, Kamis (6/11/2025).

Asep juga menyoroti persoalan kekurangan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Menurutnya, jumlah pegawai yang terbatas membuat penerapan WFH berpotensi menghambat layanan jika tidak diatur dengan cermat. Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Kita juga harus melihat kondisi pegawai yang ada. Kalau sebagian WFH, apakah pelayanan tetap maksimal atau justru terganggu? Ini yang sedang kami hitung," ujarnya.

Sate tidak beroperasi. Lampu-lampu dimatikan dan aktivitas kantor nyaris tak ada. Namun, unit pelayanan teknis daerah (UPTD) dan OPD yang memiliki fungsi layanan langsung tetap masuk kantor.

"Hanya unit tertentu yang tetap WFO, seperti bidang pajak atau pelayanan publik. Lainnya bekerja dari rumah," ujar Adi Komar.

Pemerintah juga menekankan agar sistem kerja jarak jauh ini tidak menurunkan produktivitas. Setiap pegawai diwajibkan mengirim laporan harian dan mengikuti rapat secara daring jika diperlukan.

"Kalau ada agenda penting di hari Kamis, kami tetap adakan lewat Zoom atau platform online lainnya," jelas Dedi Supandi.

Kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada layanan outsourcing seperti kebersihan dan keamanan kantor. Aktivitas kantor yang menurun membuat beban kerja petugas berkurang sehingga biaya layanan turut bisa dihemat.

"Efisiensi juga terjadi di sisi cleaning service dan petugas jaga. Bebannya turun, jadi biayanya pun bisa ditekan," tambah Dedi. (gus,kcm,ist/dya)

UJI COBA WFH ASN JAWA BARAT

Berdasarkan Surat Edaran No. 150/KPG.03/BKD

- **Periode Uji Coba**
November - Desember 2025
- **Skema Pelaksanaan November 2025**
- ASN WFH setiap Kamis.
- Kecuali pegawai yang memberikan layanan publik langsung.
- **Skema Pelaksanaan Desember 2025**
Sistem bergilir (50/50):
- 50% pegawai WFH.
- 50% pegawai bekerja di kantor.
- **Kewajiban OPD**
- Mencatat penggunaan fasilitas kantor (air, listrik, dan sarana lainnya).
- Laporan setiap bulan untuk evaluasi efisiensi.
- **Tujuan Uji Coba**
- Mengukur keefektifan sistem hybrid working.
- Menekan biaya operasional.
- Tanpa menurunkan kinerja pegawai.
- **Sasaran**
Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat.
- **Alasan WFH pada Hari Kamis**
- Kamis: Lebih aman, menjaga ritme kerja tetap stabil, dan paling efektif untuk memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah.
- Kalau Senin atau Jumat berpotensi memicu libur panjang.



Ia menambahkan, keputusan akhir mengenai apakah Tasikmalaya akan mengikuti jejak Pemprov Jabar atau tidak tetap akan ditentukan oleh Bupati Tasikmalaya. "Nanti, Pak Bupati yang lebih punya wewenang tentang itu," pungkasnya. (tin,ist/dya)

DETEKSI 71 KONTEN PELANGGARAN TKA, KEMENDIKDASMEN: TAK ADA TOLERANSI

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) siswa yang melakukan pelanggaran akan tetap dikirimkan ke panitia Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Namun, nilai mereka bisa nol jika terbukti curang. Dari data, total temuan dari media sosial mencapai 71 konten.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Toni Toharudin menegaskan tidak ada toleransi bagi peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang melakukan kecurangan. Ia menegaskan bahwa TKA tidak hanya menguji kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan integritas peserta.

"Kami menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kecurangan sehingga kami menggandeng inspektorat jenderal untuk mengawasi jalannya TKA ini apabila ada kaitannya dengan kecurangan atau pelanggaran," tegasnya dalam acara Taklimat Media TKA di Hotel Sari Pacific, Jl MH



Suasana pantauan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Command Center/Posko TKA Nasional milik Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dok.Humas Kemendikdasmen)

Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (6/11/2025).

Toni menyebut jumlah kasus yang terdeteksi sebenarnya tidak besar,

tetapi tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menjelaskan bahwa total temuan dari media sosial mencapai 71 konten.

Namun angka tersebut bukan berarti ada 71 pelaku, karena banyak di antaranya merupakan unggahan ulang atau repost dari video yang sama.

"Kalau dilihat semuanya itu sebenarnya itu tidak banyak jumlahnya pelanggaran live TikTok itu cuma berapa orang. Live TikTok yang banyak ditonton orang itu kan yang pertama. Totalnya ada 71 di medsos. Tetapi 71 ini tentunya juga tidak masing-masing ya ada yang repost dan lain-lain," ujar Toni.

Toni menegaskan bahwa semua temuan tersebut telah didokumentasikan dan diserahkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen untuk ditindaklanjuti. Saat ini tim sedang mengidentifikasi jumlah pelaku asli di balik penyebaran konten tersebut.

"Dan inspektorat melakukan follow up terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada," katanya.

Toni mengatakan Kemendikdasmen telah melakukan pengawasan TKA yang melibatkan lebih dari 50.000 pengawas, 1.710 penyelia perguruan tinggi, dan lebih dari 60.000 proktor sekolah. Pelaksanaan dipantau langsung dari posko teknis pusat yang di mana perwakilan setiap dinas pendidikan stand by menjadi pengawas teknis.(gus,ist,ant/dya)

PPP BULU TUBAN LUNCURKAN APLIKASI SIMPELPAS MOBILE UNTUK PERMUDAH AKSES INFORMASI NELAYAN



meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital. Kali ini, PPP Bulu resmi meluncurkan aplikasi SIMPELPAS Mobile, yang dirancang khusus bagi pengguna smartphone berbasis Android.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempermudah masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan dalam mengakses berbagai informasi dan layanan ke-pelabuhanan secara cepat, transparan, dan efisien. Kepala UPT PPP Bulu

menjelaskan bahwa SIMPELPAS Mobile merupakan hasil pengembangan dari sistem informasi pelabuhan yang telah lebih dulu diterapkan dalam bentuk web.

"Kami menyadari bahwa mayoritas nelayan saat ini sudah menggunakan smartphone. Karena itu, digitalisasi layanan dalam bentuk aplikasi mobile menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan kami kepada masyarakat," ujarnya. Diketahui peluncuran dilakukan pada 10 Oktober 2025.

Kehadiran SIMPELPAS Mobile memungkinkan nelayan untuk memperoleh berbagai informasi penting tanpa harus datang langsung ke kantor pelabuhan. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi, mulai dari pengurusan dokumen, perizinan kapal, hingga informasi pelayanan dan kebijakan terbaru, dapat diakses langsung dari ponsel. Selain itu, nelayan juga dapat memantau pengumuman terkini mengenai kondisi cuaca, jadwal lelang, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan.

Menurut Kepala UPT, kehadiran aplikasi ini menjadi solusi untuk memangkas rantai birokrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama.

"Dengan aplikasi ini, proses

pengurusan menjadi lebih singkat. Nelayan bisa lebih fokus pada aktivitas melaut dan meningkatkan hasil tangkapan, karena urusan administrasi dapat dilakukan dari mana saja," tambahnya.

Inovasi digital ini sekaligus menjadi langkah konkret PPP Bulu dalam mendorong terwujudnya ekosistem nelayan digital di wilayah Pantai Bulu. Untuk memastikan pemanfaatan aplikasi secara optimal, pihak pelabuhan juga berkomitmen melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para nelayan agar lebih terbiasa menggunakan teknologi dalam kegiatan mereka sehari-hari.

Aplikasi SIMPELPAS Mobile kini sudah dapat diunduh oleh pengguna Android melalui kanal resmi yang disediakan oleh UPT PPP Bulu. Peluncuran ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan bukan lagi wacana, melainkan langkah nyata menuju layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan.(adv)

TUBAN — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu, Kabupaten Tuban, kembali menunjukkan komitmennya dalam

Bencana Alam di Kota Malang Naik, Hingga November Tercatat 490 Kejadian



Banjir yang terjadi di wilayah Kota Malang. (dok. BPBD Kota Malang)

MALANG- Jumlah kejadian bencana alam di Kota Malang mengalami peningkatan pada tahun 2025. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, hingga awal November tercatat sebanyak 490

kasus bencana, naik dari 470 kejadian pada tahun sebelumnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan dari total kejadian yang tercatat, bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir dan tanah longsor, disusul insiden akibat angin kencang yang merusak sejumlah fasilitas warga.

"Setiap tahun trennya meningkat seiring dengan semakin masifnya intensitas hujan.

Jumlah yang tahun sebelumnya ada 470 kejadian bencana, per awal November 2025 ini naik menjadi 490 untuk kasus bencana akumulatif mulai dari banjir, longsor, dan lain-lain," ujar Prayitno, Kamis (6/11/2025).

Meski mengalami peningkatan, Prayitno menegaskan tingkat ancaman bencana di Kota Malang tergolong sedang, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang memiliki risiko geologis lebih tinggi.

"Kota Malang ini ancamannya sedang. Tidak seperti daerah lain yang punya potensi gunung merapi, lahar, dan tsunami. Di Kota Malang hanya cuaca ekstrem, banjir, dan longsor," terangnya.

Sementara itu, dalam rilis resmi BMKG Juanda pada periode 6-12 November 2025, disebutkan hampir seluruh wilayah Jawa Timur telah memasuki musim hujan. Dalam sepekan ke depan, BMKG memprakirakan akan terjadi peningkatan potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat.

BMKG menjelaskan, potensi tersebut disebabkan adanya gangguan gelombang atmosfer Rossby dan Low Frequency yang saat ini melintasi wilayah Jawa Timur. Selain itu, pola belokan angin di wilayah Jatim serta

suhu muka laut yang hangat di sekitar Selat Madura turut mendukung pembentukan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan intensitas sedang hingga lebat.

Menanggapi kondisi tersebut, BPBD Kota Malang terus memperkuat langkah mitigasi bencana melalui penyebaran informasi cuaca harian dari BMKG. Informasi tersebut dikirimkan setiap hari kepada pejabat hingga tingkat kelurahan. Kemudian diteruskan kepada kelompok kelurahan tangguh yang memiliki sekitar 30 anggota di tiap wilayah.

"Harapannya, masyarakat bisa segera mengambil langkah antisipasi," tuturnya.

Selain penyebaran informasi, BPBD juga gencar melakukan pelatihan mitigasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir. Hingga kini, sekitar 2.000 warga telah mendapatkan pelatihan, dan sebanyak 1.000 orang tambahan dijadwalkan akan mengikuti pelatihan serupa. (Santi/Dya)

Dari Total 1.644 Km, 80% Jalan di Kabupaten Malang Sudah Berstatus Mantap

MALANG - Dari total panjang jalan yang mencapai 1.644 kilometer, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang mencatat 80 persen di antaranya telah berstatus jalan mantap. Capaian tersebut merupakan hasil penanganan infrastruktur jalan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 ini.

"Per Oktober kemarin, jalan mantap Kabupaten Malang itu sudah mencapai 80 persen dari 1.644 kilometer. Jadi ada yang sudah mantap dan yang belum mantap sekitar beberapa ratus kilometer," ujar Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma, dikutip pada Kamis (6/11/2025).

Pria yang akrab disapa Oong ini menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya memprioritaskan jalan dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tinggi atau jalan utama yang sering dilalui masyarakat.

"Rata-rata kita mengutamakan yang kemarin 80 persen itu dengan LHR tinggi atau jalan-jalan utama," imbuhnya.

Sementara itu, untuk 20 persen ruas jalan yang belum dalam kondisi mantap, DPUBM akan memfokuskan

penanganannya pada tahun 2026. Fokus utamanya tetap diarahkan pada jalan-jalan dengan intensitas lalu lintas tinggi agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.

Oong menyebutkan, pada tahun 2025, pihaknya mengelola alokasi anggaran belanja modal untuk penanganan jalan sebesar Rp314 miliar. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, DPUBM dituntut bekerja secara efektif dan efisien dengan berlandaskan data kondisi jalan.

"Makanya dengan anggaran sekian, itu bagaimana kita bekerja secara efektif dan efisien, itu semua harus berdasarkan data. Mana jalan yang rusak ringan, sedang sampai berat," tutur Oong.

Ia mencontohkan, jika dari hasil survei ditemukan kondisi jalan rusak ringan, maka penanganannya cukup dilakukan dengan metode patching Campuran Beraspal Panas (CAP). Langkah ini dinilai lebih hemat anggaran namun tetap efektif menjaga kualitas jalan.

"Jadi semisal melihat jalan dalam kondisi rusak ringan, jangan langsung kita overlay. Itu akan membuang anggaran dengan kondisi luas

wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamatan," jelasnya.

Selain efisiensi anggaran, lanjutnya, DPUBM juga menyesuaikan alokasi belanja dengan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi maupun jalan nasional. Dari total panjang jalan sebelumnya 1.668 kilometer, kini panjang jalan kabupaten tercatat 1.644 kilometer sesuai Surat Keputusan (SK) terbaru.

"Jalan K-1 kita sepanjang 1.644 kilometer sesuai dengan SK yang baru. Kalau dulu kan 1.668 kilometer, sekarang sudah 1.644 kilometer karena beberapa sudah kita upgrade menjadi jalan provinsi dan menjadi jalan nasional," papar Oong.

Ditambahkannya, berbagai faktor teknis seperti kondisi drainase,

Ilustrasi: Ruas jalan mantap di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)



genangan air, kapasitas kendaraan yang melintas, hingga potensi bencana juga turut mempengaruhi penurunan kinerja jalan setiap tahun.

"Kalau jalan nasional bisa terjadi penurunan kinerja sampai 10 persen. Jalan kabupaten dengan kondisi banjir segala macam bisa mengalami penurunan kinerja setiap tahun mencapai 15 persen dan itu normal," pungkas Oong. (Santi/Dya)

KORUT MURKA ATAS SANKSI AS

Buntut Pencurian Kripto Rp 50 Triliun untuk Program Nuklir Pyongyang

Korea Utara (Korut) kembali menuding Amerika Serikat (AS) bersikap bermusuhan setelah Washington menjatuhkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang diduga terlibat dalam pencucian uang hasil kejahatan siber untuk mendanai program nuklir Pyongyang. Rezim Kim Jong Un menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan jahat” yang memperlihatkan niat AS untuk menekan Korut tanpa henti, sekaligus memperingatkan bahwa kebijakan seperti itu hanya akan memperburuk hubungan kedua negara.

Dalam pernyataan yang disiarkan Korean Central News Agency (KCNA), Kim Un Chol, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara untuk Urusan AS, menegaskan bahwa sanksi baru itu menjadi bukti nyata sikap bermusuhan Washington. “AS seharusnya tidak berharap pendekatan yang penuh tekanan, ancaman, dan pemerasan dapat berhasil diterapkan terhadap DPRK suatu hari nanti,” ujarnya pada Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, “Dengan melakukan hal itu, pemerintahan AS telah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka akan bersikap bermusuhan terhadap DPRK hingga akhir.”

Diketahui, Departemen Keuangan AS, pada Selasa (4/11/2025), mengumumkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang dituduh mencuri lebih dari 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 50 triliun) dalam bentuk mata uang kripto selama tiga tahun terakhir. Dana tersebut diyakini digunakan untuk membiayai program senjata nuklir Korea Utara.

Menurut John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, “Peretas yang disponsori negara Korea Utara mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim mereka. Tindakan ini secara langsung mengancam keamanan AS dan dunia.”

AS menuding dua bankir Korea Utara, Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, sebagai pengelola dana kripto senilai 5,3 juta dolar AS untuk First Credit Bank, lembaga keuangan yang sudah disanksi sejak 2017 karena mendukung program rudal Pyongyang.

Selain itu, sanksi juga menjerat Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC)—perusahaan TI asal Pyongyang—yang diduga mengirim delegasi pekerja TI ke Shenyang dan Dandong di China guna menyamarankan asal dana dari pekerjaan palsu.

U Yong Su, presiden KMCTC, dan Ryujong Credit Bank yang diduga memfasilitasi transaksi ilegal lintas perbatasan antara China dan Korea Utara, turut masuk dalam daftar hitam.

Lima perwakilan lembaga keuangan Korea Utara di China dan Rusia, yakni Ho Yong Chol, Han Hong



Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa markas besar Korps ke-11 Tentara Rakyat Korea di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara [Dok. AFP]

Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok, juga disebut membantu transaksi bernilai jutaan dolar bagi bank-bank yang telah disanksi.

Analisis TRM Labs menunjukkan

dompet kripto milik First Credit Bank menerima arus dana rutin menyerupai “pembayaran gaji” dari pekerja TI Korea Utara yang bekerja di luar negeri menggunakan identitas



Pesawat pengebom B-1B Angkatan Udara AS, jet tempur F-16, dan F-35A Angkatan Udara Korea Selatan membuat formasi selama latihan udara bersama, Korea Selatan, (19/3/2023). (via Reuters/South Korean Defence Ministry)

AMERIKA Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) kembali menunjukkan kekompakan militer mereka di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Untuk pertama kalinya dalam sejarah aliansi yang telah berusia 72 tahun, Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, dan mitranya dari Korea Selatan, Jenderal Jin Yong-sung, terbang bersama menggunakan jet tempur untuk memperlihatkan kesiapan udara gabungan menghadapi ancaman Pyongyang.

Melansir Newsweek, penerbangan formasi tersebut dilakukan setelah Rapat Komite Militer ke-50 di Seoul, yang membahas ancaman nuklir dan rudal canggih Korut serta meningkatnya

persaingan senjata global. Caine dan Jin masing-masing menerbangkan jet tempur F-16 milik AS dan KF-16 milik Korea Selatan dari Pangkalan Udara Osan, melintasi beberapa wilayah termasuk Chuncheon, Daejeon, dan Camp Humphreys.

Dua jet tempur tambahan dan satu pesawat peringatan dini E-7 ikut mengawal penerbangan simbolik itu. Pihak Kepala Staf Gabungan Korsel menyebut misi udara tersebut menegaskan “kekuatan dan ketahanan aliansi pertahanan” kedua negara.

“Selama diskusi, Jenderal Jin dan Jenderal Caine sependapat bahwa perdamaian di Semenanjung Korea harus didukung oleh kekuatan gabungan kedua negara,” demikian

palsu, dengan total lebih dari 12,7 juta dolar AS masuk antara Juni 2023 dan Mei 2025.

Laporan gabungan AS, Eropa, dan Asia bulan lalu bahkan menggambarkan kemampuan siber Korea Utara “mendekati tingkat kecanggihan China dan Rusia,” dengan strategi sistematis melanggar resolusi PBB melalui operasi peretasan dan penempatan pekerja TI di luar negeri.

Hurley menegaskan, “Kami akan terus memburu siapa pun yang membantu mengalirkan uang bagi program nuklir Pyongyang. Tidak ada tempat aman bagi para fasilitator kejahatan finansial mereka.”

Menanggapi tuduhan itu, Kim Un Chol menegaskan sanksi tersebut hanya menunjukkan kegagalan kebijakan AS. “Langkah ini hanyalah contoh khas dari kegagalan kebijakan Washington terhadap DPRK yang tak dapat disembuhkan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tekanan seperti itu tidak akan memengaruhi arah kebijakan Korea Utara dan tidak akan membawa Washington mendekat ke meja perundingan.

Menurut Kim, tindakan tersebut juga menandai “berakhirnya spekulasi dunia mengenai perubahan kebijakan AS terhadap DPRK.” Ia menyebut upaya menghadirkan kembali “skenario lama yang telah gagal” adalah langkah yang bodoh. (tin,afp,kcna,ist/dya)

pernyataan resmi dari militer AS.

“Keduanya menekankan pentingnya mempertahankan kesiapan militer bersama untuk menanggapi segala bentuk ancaman.”

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Jin menyebut penerbangan tersebut sebagai simbol kuat dari hubungan militer yang semakin erat. “Sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan dan sesama pilot Angkatan Udara, penerbangan komando ini memungkinkan saya benar-benar menghargai kekuatan aliansi ROK-AS,” katanya.

Selain memperlihatkan kekuatan udara, pertemuan dua jenderal itu juga menyoroti kekhawatiran atas kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia yang kian terbuka. Caine dan Jin sepakat bahwa pencegahan dan kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada Semenanjung Korea, tetapi juga untuk menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik secara menyeluruh.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan pasukan Amerika di Korea Selatan akan digunakan secara fleksibel untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi regional. “Kami berkomitmen menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujarnya. (wid,new,ist/dya)

5 LANGKAH SKINCARE PRIA

WAJAH SEHAT DAN BEBAS KUSAM

Kesadaran merawat kulit kini tidak lagi identik dengan perempuan. Pria pun semakin memahami bahwa kesehatan kulit berperan besar dalam penampilan, rasa percaya diri, serta perlindungan dari masalah kulit jangka panjang. Rutinitas skincare pria sebenarnya sederhana cukup membersihkan wajah, memakai pelembap, dan menggunakan sunscreen. Namun agar hasilnya lebih efektif, beberapa langkah tambahan seperti eksfoliasi dan penggunaan serum sangat dianjurkan.

Dengan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk merawat kulit, pria dapat memperoleh wajah yang lebih sehat, bersih, dan jauh dari kesan kusam. Perawatan kulit bukan hanya soal estetika, melainkan juga investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan kulit di masa depan.

Membersihkan wajah dengan benar akan membuat tahapan skincare berikutnya menyerap lebih optimal. Berikut panduan lengkap lima langkah dasar perawatan kulit pria yang disarankan oleh dermatolog.

Membersihkan Wajah

Rutinitas skincare yang baik selalu dimulai dari pembersihan wajah. Dikutip dari Vogue, para ahli menyarankan untuk mencuci wajah dua kali sehari—pagi dan malam. Pada pagi hari, mencuci wajah membantu menghapus minyak, keringat, serta sel kulit mati yang muncul selama tidur. Pada malam hari, langkah ini penting untuk membersihkan polusi, debu, dan kotoran yang menumpuk dari aktivitas sepanjang hari.

Membersihkan wajah secara rutin membantu meminimalkan minyak berlebih, menurunkan risiko jerawat, dan menghindari iritasi kulit. Pria

dianjurkan memilih pembersih yang sesuai dengan tipe kulitnya, seperti gel untuk kulit berminyak atau krim untuk kulit kering. “Pilih pembersih yang lembut dan bebas sulfat agar tidak menghilangkan minyak esensial alami kulit,” jelas dokter kulit Noah Gratch. Dokter kulit Brendan Camp menambahkan bahwa bagi pemilik kulit sangat kering, frekuensi mencuci wajah bisa disesuaikan. Menurutnya, mereka “dapat membersihkan wajah sekali sehari atau hanya menggunakan air” agar kulit tidak semakin kering.

Eksfoliasi

Eksfoliasi adalah langkah mengangkat sel kulit mati sehingga tekstur kulit tampak lebih halus dan cerah. Pria tidak perlu melakukannya setiap hari, tetapi harus konsisten beberapa kali dalam seminggu. Kulit pria cenderung lebih tebal dan lebih mudah berminyak sehingga eksfoliasi sangat membantu mencegah pori tersumbat.

“Saya merekomendasikan eksfoliasi dua hingga tiga kali seminggu, karena dapat mengangkat sel kulit mati, membuka pori-pori tersumbat, dan membantu mencegah rambut tumbuh ke dalam,” kata Noah Gratch.

Untuk hasil terbaik, gunakan produk dengan bahan aktif seperti salicylic acid yang efektif membersihkan pori hingga ke dalam, atau glycolic acid yang membantu meratakan tekstur kulit dan mendorong regenerasi sel. Eksfoliasi yang tepat membuat wajah lebih cerah, mencegah jerawat, dan membantu produk skincare lainnya bekerja maksimal.

Serum

Serum adalah produk dengan konsentrasi bahan aktif tinggi yang berfungsi menargetkan masalah kulit tertentu seperti kulit kusam, bintik hitam, hiperpigmentasi, atau bekas jerawat. Pria yang baru memulai skincare bisa memilih serum vitamin C karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan. “Vitamin C dapat mencerahkan kulit, melindungi dari stresor lingkungan, dan menetralkan radikal bebas,” jelas Brendan Camp.

Vitamin C membantu meratakan warna kulit, mengurangi noda hitam, dan memberikan

efek wajah lebih segar. Jika fokus pada anti-aging, serum kombinasi retinol dan vitamin C bisa digunakan secara bertahap. Sementara itu, pemilik kulit berminyak atau mudah berjerawat akan mendapatkan banyak manfaat dari serum niacinamide yang bersifat menenangkan, mengurangi kemerahan, serta membantu mengecilkan tampilan pori. Penggunaan serum secara teratur dapat memberikan perubahan signifikan pada kondisi kulit dalam beberapa minggu.

Pelembap

Pelembap adalah tahap esensial dalam rutinitas skincare pria. Moisturizer menjaga keseimbangan kadar air di kulit, menstabilkan produksi minyak, serta memperkuat skin barrier agar tidak mudah mengalami iritasi. Gunakan pelembap setelah pemakaian serum pagi dan malam hari.

Untuk kulit berminyak, pilih

pelembap berbasis air dengan tekstur ringan seperti gel. Sementara pemilik kulit kering disarankan memilih pelembap berformula krim yang lebih kaya dan bebas pewangi. “Penggunaan pelembap secara rutin dapat menjaga skin barrier tetap sehat, mencegah kulit kering, dan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan,” ujar Noah Gratch.

Sunscreen

Tahap terpenting dalam skincare pagi adalah penggunaan sunscreen atau SPF. Produk ini melindungi kulit dari radiasi UV yang dapat menyebabkan kulit gelap, munculnya garis halus, kerutan dini, bahkan kanker kulit.

“Pelembap dengan SPF dapat membantu mencegah kanker kulit dan mengurangi dampak radiasi UV pada penuaan dini, termasuk munculnya garis halus, kerutan, dan bintik hitam,” ujar Noah Gratch.

Pilih sunscreen dengan SPF 30 atau lebih tinggi agar perlindungan mencapai sekitar 97%. Untuk pria yang ingin rutinitas praktis, pelembap dengan SPF bisa menjadi opsi agar langkah skincare lebih ringkas.

Pemakaian sunscreen secara rutin terbukti membuat kulit tampak lebih cerah, terhindar dari kerusakan akibat matahari, dan menjaga elastisitas kulit dalam jangka panjang. (wid,ist/dya)



ALARM LINGKUNGAN BERBUNYI: UNTUK KALI PERTAMA NYAMUK HIDUP DI ISLANDIA

Islandia, negara yang selama ini dikenal sebagai wilayah tanpa kehadiran serangga pengisap darah, kini menghadapi fenomena lingkungan yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, ditemukan nyamuk yang benar-benar hidup di alam Islandia. Tiga ekor nyamuk tersebut terdeteksi pada bulan ini di Kjos, lembah pedesaan dekat Hvalfjörður.

Penemuan yang dianggap bersejarah sekaligus mencemaskan itu awalnya diunggah oleh Björn Hjalton, seorang pemerhati serangga, melalui grup Facebook Skordyr a Islandi (Serangga di Islandia). Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian luas masyarakat serta lembaga penelitian, sebagaimana diberitakan Layanan Penyiaran Nasional Islandia.

Sampel spesimen lantas dikirimkan ke Institut Sejarah Alam Islandia untuk dilakukan analisis. Ahli entomologi Matthias Alfredsson memastikan identifikasi spesies tersebut dan menegaskan tingkat kekhawatirannya.

"Besarnya kemungkinan nyamuk ini akan menetap di sini," ujar Matthias memberi peringatan.

Spesies yang ditemukan adalah *Culiseta annulata*, nyamuk yang dikenal mampu bertahan pada suhu rendah dan umum dijumpai di kawasan Eropa utara. Ketahanan tubuhnya terhadap iklim dingin

menjadikan spesies ini berpeluang besar beradaptasi dengan lingkungan Islandia.

Matthias menjelaskan lebih lanjut, "Spesies ini biasanya bertahan selama musim dingin dengan bersembunyi di tempat teduh seperti ruang bawah tanah atau kandang ternak."

Habitat Meluas

Sebelumnya memang pernah ada catatan nyamuk yang tiba di Islandia. Namun kedatangan tersebut bersifat insidental, biasanya terbawa pesawat, dan tidak mampu bertahan hidup. Kasus terbaru ini berbeda karena untuk pertama kalinya nyamuk ditemukan hidup serta diperkirakan dapat berkembang biak.

Para ilmuwan sebenarnya telah lama menduga bahwa perubahan iklim berpotensi membuka jalan bagi nyamuk untuk bermigrasi ke wilayah yang sebelumnya terlalu dingin. Apalagi sejak tahun 2015, serangga pengisap darah lain seperti agas penggigit (biting midges) sudah lebih dulu menetap di Islandia. Fenomena terbaru ini

menjadi sinyal kuat bahwa perubahan iklim global benar-benar memperluas habitat berbagai spesies serangga tahan dingin hingga ke wilayah utara yang sebelumnya dianggap mustahil dihuni.

Jika *Culiseta annulata* berhasil menetap secara permanen, Islandia akan menghadapi tantangan baru, mulai dari risiko penyakit yang dibawa nyamuk hingga gangguan bagi masyarakat maupun hewan ternak.

Pemerintah dan peneliti kini menempatkan pemantauan lingkungan sebagai prioritas utama.

Islandia selama ini dikenal sebagai salah satu negara bebas nyamuk, meski negara tetangganya seperti Norwegia, Skotlandia, dan Greenland memiliki berbagai spesies serangga itu.

Para ilmuwan menduga nyamuk tak bisa berkembang biak dalam kondisi iklim ekstrem di Islandia. Profesor emeritus limnologi di Universitas Islandia, Gísli Már Gíslason, mengatakan

nyamuk yang sesekali terbawa ke Islandia melalui pesawat pun tidak pernah bisa membentuk populasi.

Negara itu memiliki banyak kolam dan rawa yang cocok untuk bertelur. Namun, siklus beku-cair berulang sepanjang tahun membuat telur dan larva mati sebelum berkembang menjadi nyamuk dewasa.

Ahli biologi serangga dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Robert Jones, mengatakan bahwa larva nyamuk membutuhkan air yang tidak membeku untuk berkembang biak dengan optimal. Ketika suhu terlalu rendah, proses metamorfosis mereka terhenti.

"Siklus ini mengganggu perkembangan dan membunuh telur serta larva nyamuk sebelum sempat menjadi dewasa, sehingga populasi sulit terbentuk dan penyebaran nyamuk dapat menurun secara signifikan," tutur dia. (wid,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MUSEUM SENI TERAPUNG PERTAMA DI DUNIA RESMI HADIR DI DUBAI

Dubai kembali menunjukkan obsesi futuristiknya lewat sebuah mahakarya baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Kota metropolis di Uni Emirat Arab itu meresmikan Dubai Museum of Art (DUMA), yang diklaim sebagai museum seni terapung pertama di dunia. Proyek ikonik tersebut dikembangkan Al Futtaim Group dan dirancang oleh maestro arsitektur Jepang, Tadao Ando.

Peresmian museum berlangsung di Dubai Creek dan dihadiri oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA sekaligus Penguasa Dubai. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa seni memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah kota.

"Budaya dan seni adalah jiwa sebuah kota dan lensa yang melaluinya kemajuannya terlihat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa DUMA akan menjadi "mercusuar baru" yang memperkuat identitas budaya Dubai di mata dunia.

DUMA tidak hanya memamerkan karya seni—bangunannya sendiri dirancang sebagai karya seni. Mengusung gaya khas Tadao Ando, museum ini memadukan permainan cahaya, ruang, dan suasana hening. Bentuknya terinspirasi dari laut dan mutiara, simbol historis masyarakat Dubai. Struktur melengkung menyerupai cangkang menjadi wadah bagi ruang pameran melingkar yang merepresentasikan kesatuan dan kesinambungan.

Di bagian tengah bangunan terdapat bukaan silinder besar yang menghadirkan cahaya alami, menciptakan efek pantulan lembut layaknya kilau mutiara. Museum setinggi lima lantai ini dilengkapi galeri fleksibel di lantai bawah, restoran dan lounge VIP di lantai tiga, serta ruang acara dan fasilitas pendukung di tingkat terbawah.

Tak hanya menjadi ruang pamer, DUMA dirancang sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Diskusi kreatif, program edukasi, hingga forum seniman akan berlangsung secara rutin, memperkaya interaksi budaya pengunjung. Konsep terapungnya menghadirkan pengalaman multisensorik yang

menyatukan seni, arsitektur, air, dan cahaya.

Visi Jadi Pusat Seni Global

Sheikh Mohammed menegaskan bahwa DUMA menjadi bagian dari strategi Dubai untuk memperkokoh posisinya sebagai pusat kreativitas dunia. "Dubai adalah rumah bagi berbagai komunitas dan industri kreatif dari seluruh dunia. Landmark budaya baru ini memperkuat tujuan strategis kami untuk memposisikan Dubai sebagai pusat seni global," ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah dan pihak swasta yang dinilai krusial dalam mewujudkan proyek sebesar ini. "Museum Seni Dubai menunjukkan kekuatan kemitraan publik-swasta untuk memunculkan ide-ide berani dan menciptakan landmark kelas dunia," tambahnya.

Bagi Tadao Ando, proyek ini merangkum dialog antara air, cahaya, dan batin manusia. Setiap elemen dirancang untuk menghadirkan kedamaian, kesederhanaan, dan makna mendalam. Sementara itu, Wakil Ketua dan CEO Al Futtaim Group, Omar Al Futtaim, menilai DUMA sebagai simbol keterbukaan Dubai terhadap kreativitas global.

"Arsitektur Tadao Ando berbicara dalam bahasa cahaya, keheningan, dan jiwa... sebuah mahakarya yang menggambarkan kecerdasan dan keunggulan abadi," katanya.

Omar juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan inklusivitas dalam proyek tersebut. Menurutnya, DUMA diharapkan menjadi representasi kemajuan yang tetap menghormati lingkungan sekaligus memperkaya kehidupan masyarakat.

Dengan hadirnya museum terapung pertama di dunia ini, Dubai sekali lagi membuktikan diri sebagai kota yang tak pernah berhenti berinovasi. DUMA

diprediksi menjadi destinasi seni global yang menawarkan pengalaman estetika baru, di mana kreativitas dan arsitektur berpadu di atas permukaan air.(wid,rls,ist/dya)

3 Kota Paling Diminati Wisatawan

Dubai kembali menegaskan dominasinya sebagai destinasi global. Menurut laporan terbaru ForwardKeys, lembaga analisis perjalanan yang dikelola Amadeus, kota futuristik tersebut diprediksi menjadi salah satu dari tiga tujuan wisata paling ramai di dunia pada kuartal akhir 2025, bersama Tokyo dan London. Analisis itu didasarkan pada data pra-pemesanan internasional yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Dilansir dari Azernews, jumlah wisatawan internasional yang memilih Dubai tercatat naik 6 persen dibanding periode yang sama pada 2024. Lonjakan ini sekaligus mengukuhkan peran Dubai sebagai pusat pariwisata, bisnis, dan hiburan skala global.

Selain itu, pada tiga bulan terakhir 2025, Dubai menyumbang sekitar 2,2 persen dari total kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia, angka yang menunjukkan betapa besarnya pangsa pasar pariwisata kota tersebut. India dan Inggris tetap menjadi pasar terbesar bagi Dubai.

Namun, China mencatat pertumbuhan paling mencolok dengan peningkatan pemesanan mencapai 34 persen, mengembalikan negara tersebut ke jajaran sepuluh besar sumber wisatawan. Jerman pun menunjukkan tren positif dengan kenaikan hingga 9 persen.

Peningkatan kedatangan ini bertepatan dengan musim liburan musim dingin, periode paling sibuk dalam kalender wisata Dubai. Infrastruktur mutakhir, pusat perbelanjaan mewah, ragam hiburan, hingga

agenda internasional membuat kota ini semakin sulit diabaikan wisatawan dunia.

Catatan dari Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai menyebutkan, dalam tujuh bulan pertama 2025, kota tersebut telah menyambut 11,17 juta wisatawan mancanegara. Jumlah itu tumbuh 5 persen dari periode yang sama pada 2024 yang mencatat 10,62 juta pengunjung.

Para analis pariwisata menilai angka-angka tersebut sebagai bukti ketahanan industri wisata Dubai menghadapi dinamika global. Stabilitas pertumbuhan dianggap sebagai hasil dari kemampuan Dubai menjaga reputasi sebagai destinasi lengkap, memadukan keseruan kota modern, kekayaan budaya, dan standar layanan kelas atas.

Dalam jangka panjang, berbagai proyek besar yang sedang dikerjakan Dubai diperkirakan ikut memperkuat posisinya di peta wisata dunia. Perluasan kawasan Expo City Dubai serta pembangunan distrik-distrik budaya baru adalah bagian dari strategi memperluas daya tarik kota, tak terbatas pada ikon-ikon yang sudah terkenal.(gus,ist/dya)



Ironi Tanah 16 Ha ...dari hal 1

Kasus sengketa lahan antara mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), dan entitas bisnis yang terafiliasi dengan Lippo Group di kawasan Metro Tanjung Bunga (GMTD), Makassar, telah mengguncang publik dan memunculkan kembali perbincangan tentang betapa kuatnya jaringan mafia tanah di Indonesia.

Dalam kasus ini, JK menuding adanya rekayasa dan praktik ilegal yang dilakukan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), perusahaan di bawah Lippo Group, terhadap lahan miliknya seluas 16,4 hektare yang sudah lama dimiliki dan dikelola melalui PT Hadji Kalla. Amarah JK memuncak saat ia mendapati bahwa lahan tersebut dieksekusi secara sepihak, bahkan diklaim oleh seseorang bernama Manjung Ballang, seorang penjual ikan, yang secara logika tidak mungkin memiliki lahan seluas itu.

“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini!” tegas JK ketika meninjau lokasi, Rabu (5/11/2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan kemarahan dan kekecewaan mendalam terhadap praktik yang diduganya melibatkan mafia tanah dan rekayasa hukum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turut menegaskan bahwa berdasarkan catatan resmi, PT Hadji Kalla memang tercatat sebagai pemegang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas tanah sengketa tersebut. Namun, yang terjadi justru eksekusi dilakukan oleh pihak GMTD tanpa melalui proses hukum yang benar.

“Proses eksekusinya itu belum melalui constatering, yaitu pemeriksaan lapangan. Padahal di atas lahan itu masih terdapat dua permasalahan hukum yang belum selesai,” kata Nusron, Kamis (6/11/2025).

Ia juga menyebut adanya pihak ketiga bernama Mulyono yang sedang menggugat di PTUN, sehingga muncul tiga pihak bersengketa di atas lahan yang sama. Tindakan GMTD dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa kejelasan hukum dan melanggar prosedur administratif, yang seharusnya menjadi dasar dalam eksekusi aset.

Terpisah, Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan akan menelusuri surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)



Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang mendatangi langsung lokasi lahan yang kini tengah berpolemik di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (5/11/2025). (Dokumentasi/Humas PT Hadji Kalla)

Nusron Wahid yang mempertanyakan dasar hukum eksekusi lahan milik PT Hadji Kalla di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Juru Bicara PN Makassar, Wahyudi Said, mengatakan pihaknya belum menerima secara resmi surat tersebut. “Belum ada informasi yang bisa kami sampaikan. Kami akan cek dulu apakah surat itu sudah sampai ke pengadilan atau belum,” ujar Wahyudi, Kamis (6/11/2025).

Menurut dia, PN Makassar akan meninjau isi surat dari ATR/BPN apabila sudah diterima secara administratif dan dipelajari oleh pimpinan pengadilan. Langkah itu penting untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

PN Makassar menyatakan tetap berhati-hati dalam memberikan keterangan publik dan menegaskan bahwa setiap langkah eksekusi dilakukan berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht). “Kami berpegang pada putusan pengadilan yang sudah final, namun tentu tetap terbuka untuk menelaah masukan dari pihak terkait,” kata Wahyudi.

Hingga kini, pengadilan masih menunggu klarifikasi resmi dari ATR/BPN sebelum menentukan langkah lanjutan terkait sengketa lahan yang menyeret nama besar Jusuf Kalla tersebut.

Harus Jadi Alarm bagi Negara

Kasus ini menjadi alarm keras bagi negara bahwa mafia tanah masih beroperasi dengan beragam modus, bahkan berani menyasar tokoh sebesar Jusuf Kalla.

Publik pun bereaksi keras, terutama di media sosial, di mana banyak warganet mempertanyakan

nasib masyarakat kecil jika tokoh sekelas mantan wakil presiden saja bisa dirugikan.

Reaksi senada juga datang dari kalangan pakar hukum. Hudi Yusuf dari Universitas Bung Karno menyebut kasus ini menunjukkan bahwa mafia tanah tidak mengenal status sosial. “Mafia tanah tidak melihat besar kecilnya orang, siapapun jika sudah tidak berkuasa pasti akan diambil. Kalau orang sekelas JK saja bisa diperlakukan seperti ini, apalagi rakyat kecil,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar sengketa perdata, melainkan pidana penyerobotan tanah. Ia menjelaskan bahwa modus mafia tanah sering kali melibatkan aparat pertanahan dalam pembuatan sertifikat ganda, yang dimungkinkan oleh birokrasi agraria yang rumit dan tertutup.

“Jika benar ada sertifikat ganda di atas lahan yang sama, itu berarti telah terjadi pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Fickar.

Menurutnya, akar persoalan utama ada pada birokrasi yang berbelit-belit sehingga membuka peluang manipulasi bagi pihak yang memiliki akses finansial dan koneksi politik. Ia menegaskan perlunya reformasi total terhadap tata kelola pertanahan dengan menyederhanakan sistem sertifikasi serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Birokrasi harus dibuat sederhana agar masyarakat kecil bisa mengaksesnya, sementara bagi mafia tanah harus dihukum seberat-beratnya, bahkan seumur hidup,” katanya.

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, juga menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam mengelola aset tanah dan menyerukan reformasi total pada manajemen pertanahan. “Kian urgen segera mereformasi manajemen pertanahan kita. Semua pihak perlu diusut,” ujarnya.

Kasus ini semakin mengguncang ketika diketahui bahwa persoalan serupa juga pernah terjadi di beberapa proyek besar yang terafiliasi dengan Lippo Group, mulai dari konflik lahan di Kemang, Jakarta Selatan, hingga persoalan aset eks-BLBI di Lippo Karawaci, Tangerang. Dalam kasus Kemang, bentrokan fisik bahkan sempat terjadi antara pihak yang mengklaim kepemilikan tanah dan aparat di lapangan.

Sementara dalam kasus Lippo Karawaci, Satgas BLBI bersama Kementerian Keuangan pada 2021 mengambil alih kembali aset senilai Rp1,33 triliun yang telah menjadi milik negara sejak krisis 1998 namun sempat dikuasai pihak ketiga. Pola-pola semacam ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap tata kelola lahan nasional.

“Korporasi besar sering terlibat dalam kasus mafia tanah, karena itu birokrasi harus tertib dan aparatnya tidak boleh bermain,” ujar Hudi Yusuf.

Ia juga menyoroti proyek Meikarta yang hingga kini menyisakan banyak keluhan warga dan pembeli yang belum menerima haknya secara penuh. Menurut Hudi, pemerintah harus benar-benar “untouchable” dan tidak bisa dibeli oleh kepentingan bisnis besar. “Administrasi tanah harus dikelola dengan jujur dan tertib, bukan untuk melayani kepentingan pengusaha hitam,” katanya. (wid,rls,ini/dya)



DPRD JATIM TEGASKAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KEHUTANAN HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT DAN EKOSISTEM



Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) masa persidangan III tahun 2025, Deni Wicaksono (tengah) bersama Wagub Jatim, Emil Elistianto Dardak (Kiri) dan Wakil Ketua DPDD Jatim, Hidayat. (foto-foto: dok.Humas DPRD Jatim)

SURABAYA – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) masa persidangan III tahun 2025 membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Rapat pada Kamis (6/11/2025) tersebut diwarnai berbagai sorotan fraksi-fraksi terkait pengelolaan hutan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Wakil Ketua DPRD Jatim sekaligus pimpinan sidang, Deni Wicaksono, menuturkan kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia hasil kayu dan non-kayu, tetapi juga sebagai penjaga ekosistem vital bagi kehidupan.

"Kehutanan harus dikelola dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan. Hutan harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Hari ini kita akan mendengarkan pemandangan umum dari tiap fraksi," ungkap Deni Wicaksono, Kamis (6/11/2025).

Sementara, Fraksi Partai Golkar menyoroti efektivitas program perhutanan sosial di Jawa Timur. Juru bicara Golkar, Sobirin, menilai bahwa peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam program tersebut belum berjalan sesuai tujuan.

"Dalam program perhutanan sosial selama ini peran LMDH tidak efektif sesuai tujuan, bahkan ada

indikasi menjadi titik awal konflik struktural horizontal, bahkan peluang terjadinya penyimpangan sebagai penyebab kerusakan kawasan hutan," ungkap Sobirin.

Sobirin menambahkan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang memposisikan masyarakat sebagai subyek, perlu dievaluasi.

"Apakah skema program PHBM yang dibangun dengan memposisikan masyarakat (termasuk desa) sebagai 'pihak atau subyek' nantinya menjadi kebijakan yang paling baik dan terpilih bagi tata kelola hutan dan ekosistemnya?" lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan intensif melalui Perda agar masyarakat paham ekosistem hutan dan benturan kepentingan antar lembaga dapat dihindari.

"Bagaimana melalui Perda ini mampu melakukan Binwas secara intens bagi masyarakat tentang ekosistem hutan, termasuk indikasi terjadinya benturan kepentingan antara lembaga-lembaga tingkat pelaksana dalam pengelolaan hutan akibat dari tidak terkoordinasi secara baik oleh Perhutani atau daerah," jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Indra Widya Agustina menekankan bahwa Raperda harus menjadi dasar hukum yang kuat dan berpihak pada

kepentingan rakyat.

"Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ini harus mampu menjadi pijakan hukum (legal-base) untuk kepentingan (social-interest) rakyat Jawa Timur sesuai dengan perkembangan kebutuhan tata kelola kehutanannya (forestries's-needs)," paparnya.

Indra menambahkan bahwa keberadaan tiga Perda sebelumnya, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2003, Perda Nomor 6 Tahun 2005, dan Perda Nomor 12 Tahun 2007, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kehutanan di Jawa Timur.

"Fraksi Partai Demokrat membutuhkan penjelasan tambahan mengenai faktor utama dan teknis apa yang menyebabkan ketiga regulasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam memberikan perlindungan hutan di Jawa Timur sehingga dihadirkan Raperda ini untuk mengganti ketiga Perda yang berlaku?" katanya.

Ia menegaskan Raperda baru harus memberikan komposisi norma hukum yang kuat agar warga mendapatkan

hak pengelolaan yang adil.

"Dengan demikian dalam Raperda ini harus memberikan komposisi norma hukum yang kuat agar warga Jawa Timur memiliki akses perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, daripada untuk kepentingan yang tidak berpihak kepada kepentingan warga Jawa Timur," pungkash Indra.

Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Hartono juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pengelolaan hutan.

"Penting untuk memastikan bahwa Raperda ini menjamin keberlanjutan ekosistem tetap terjaga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian," terangnya.

Hartono menambahkan bahwa Raperda perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan-perubahan regulasi lainnya, Raperda ini perlu disesuaikan secara berkala untuk menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan hutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," jelasnya.

"Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus bersifat inklusif, melibatkan masyarakat setempat dalam setiap proses pengelolaan, demi mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak," pungkashnya. (Pra/adv/Dya)



Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Hartono memberikan Pemandangan Umum Fraksi kepada Pimpinan Rapat Deni Wicaksono.